BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 77/IV/ TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 13/I/TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Peraturan Bupati Tana Toraja yang terarah, terpadu, terprogram dan sesuai prioritas, telah ditetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 13/I/Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa sehubungan dengan adanya usulan rancangan peraturan bupati yang belum tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2025, sehingga Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 13/I/Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 13/I/Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 13/I/Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 13/I/Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 10 April 2025

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja di Tempat;
3. Direktur RSUD Lakipadada di Makale;
4. Para Kepala Bagian Lingkup Setda di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 77/IV/TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 13/I/TAHUN 2025
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	INSTANSI TERKAIT	KET
			BARU	UBAH			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Lembang, bagi hasil pajak dan retribusi dari APBD Kabupaten Tana Toraja kepada lembang Tahun Anggaran 2025	Mengatur Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Lembang dari APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024	√	-	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, PP 43 Tahun 2014	DPML	
2	Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap Pemerintah Lembang, tunjangan pemerintah lembang dan BPL, Tambahan Penghasilan Kepala Lembang, Honorarium PKPKL, PPKL, THR, Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Transport di Lembang Tahun Anggaran 2025	Mengatur Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap Pemerintah Lembang, BPL, Tambahan Penghasilan Kepala Lembang, Honorarium PKPKL, PPKL, Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Transport di Lembang Tahun Anggaran 2024	√	-	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, PP 43 Tahun 2014	DPML	
3	Percepatan Penurunan Stunting di Lembang dan Kelurahan di Kabupaten Tana Toraja	Penurunan angka stunting	√	-	-	DPML	
4	Tunjangan THR dan Gaji Ketigabelas yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025	Mengatur terkait Tunjangan THR dan Gaji Ketigabelas yang bersumber dari APBD	√	-	Peraturan Pemerintah 15 Tahun 2023	BPKPD	
5	Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Tirta Buisun	Penyesuaian Tarif Air Minum	√	-	Permendagri, Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum	Bagian Perekonomian dan Perumda Tirta Buisun	
6	Pengadaan Barang dan Jasa pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Buisun	Pengadaan barang dan jasa	√	-	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaan barang/jasa Pemerintah	Bagian Perekonomian dan Perumda Tirta Buisun	
7	RKPD Tahun 2026	a. Pendahuluan b. Gambaran Umum Kondisi Daerah c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah g. Penutup	√	-	Permendagri 86 Tahun 2017	Semua OPD	

8	Perubahan RKPD Tahun 2025	a. Pendahuluan b. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023 Trw. II c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah e. Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan RKPD f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah g. Penutup	-	√	Permendagri 86 Tahun 2017	Semua OPD	
9	Penyelenggaraan Pemberdayaaan Masyarakat di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan di Kabupaten Tana Toraja	Pengembangan kelompok perhutanan sosial di Kabupaten Tana Toraja	√	-	Permen LH dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021	Semua OPD	
10	Adaptasi Perubahan Iklim	a. Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan iklim b. Monitoring dan Evaluasi c. Pembinaan dan Pengawasan d. Peran serta masyarakat e. Pendanaan f. Ketentuan Penutup	√		Sesuai Permen LHK Nomor P33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016	Semua OPD	
11	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkoba	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkoba	√	-	Perda Kab. Tana Toraja Nomor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan PemberantasanPenyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkoba	Badan Kesbangpol, BNNK Kab. Tana Toraja	
12	Perubahan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 21 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	Penambahan wajib lapor LHKPN dan Pencatuhan sanksi sesuai PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	√	-	Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Inpektorat Daerah, BKPSDM dan Bagian Hukum Setda	
13	Pola Tata Kelola BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	Pola Tata Kelola BLUD	√	-	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BULD	BPKPD, Dinas Kesehatan	
14	Rencana Strategis BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	Rencana Strategis BLUD	√	-	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BULD	BPKPD, Dinas Kesehatan	
15	Standar Pelayanan Minimal BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	Standar Pelayanan Minimal BLUD	√	-	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BULD	BPKPD, Dinas Kesehatan	
16	Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Keuangan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	√	-	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BULD	BPKPD, Dinas Kesehatan	
17	Rencana Aksi Penanggulangan Tuber Colosis di Kabupaten Tana Toraja	Mengatur Rencana Aksi Penanggulangan Tuber Colosis di Kabupaten Tana Toraja	√	-	Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC	Dinas Kesehatan	

18	Pemeliharaan Eliminasi Malaria	Strategi Pemeliharaan Eliminasi Malaria	√	-	Keputusan Menteri kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia	Dinas Kesehatan	
19	Rencana Kontingensi Penanggulangan Wabah	Rencana Kontingensi Penanggulangan Wabah	√	-	-	Dinas Kesehatan	
20	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik	√	-	Perpres 95 Tahun 2018	Dinas Kominfo dan Persandian	
21	Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	√	-	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan dan Pemerintahan Daerah	BPKPD	
22	Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Pembebasan Retribusi Persetujuan bangunan Gedung	√	-	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan dan Pemerintahan Daerah	BPKPD	
23	Setifikat Elektronik	Sebagai acuan dalam melaksanakan tata cara pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi	-	√	-	Dinas Kominfo dan Persandian	
24	Pedoman Perencanaan Keuangan BLUD RSUD Lakipadada	Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Rencana Bisnis dan Anggaran	√	-	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BULD	RSUD, Dinas Kesehatan	
25	Pedoman Pelaksanaan Keuangan BLUD RSUD Lakipadada	Pengelolaan Pendapatan, Belanja, Utang Piutang, Kerjasama dan Investasi	√	-	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BULD	RSUD, Dinas Kesehatan	
26	Pedoman Pertanggungjawaban Keuangan BLUD RSUD Lakipadada	Sistem Informasi Akuntasi RSUD Lakipadada	√	-	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BULD	RSUD, Dinas Kesehatan	
27	Perubahan Status UPT Dinkes RSUD Lakipadada menjadi UOBK Dinkes	Perubahan SOTK RSUD Lakipadada menjadi UOBK	√	-	PP 72 Tahun 2019	RSUD, Bagian Ortala	
28	Penyesuaian Detail Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah SakitUmum Daerah Lakipadada	Detail Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSUD Lakipapada	√		Perda Kab. Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	RSUD, Dinas Kesehatan	
29	Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia	Pengaturan mengenai Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia	√	-	Permen Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023	Bagian Hukum	
30	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	Pengaturan terkait Pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	√	-	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD, Bag. Organisasi , BKPSDM	

31	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024	Mengatur Terkait Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024	√	-	Pemendagri 77 Tahun 2020	BPKPD	
32	Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	Mengatur Terkait Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	√	-	Pemendagri 77 Tahun 2020	BPKPD	
33	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026	Mengatur Terkait Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026	√	-	Pemendagri 77 Tahun 2020	BPKPD	
34	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	√	-	Perda Kab. Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
35	Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	- Kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaaan, pelapoiran, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas poengelolaan keuangan daerah	√	-	- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Inspektorat Daerah, BPKPD	
		- Strategi penerapan penilaian risiko kecurangan untuk pengendalian			- Peraturan Daerah Kabupaten tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan keuangan daerah		
36	Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026	Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan yang digunakan dalam perencanaan dan Pelaksanaan APBD TA 2026	√	-	- Pemendagri No 90 Tahun 2019 - Pemenkeu No. 83/ PMK 02/2022 - Pemendagri No. 77 Tahun 2020 - Pemendagri No. 84 Tahun 2022	BPKPD	
37	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)	Pembentukan Organisai, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Labkesda	√	-	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan, dan Bagian Ortala	
38	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Pembentukan Organisai, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Puskesmas	√	-	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024	Dinas Kesehatan, dan Bagian Ortala	
39	UPT Kemetrologian	Pembentukan Organisai, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Kemetrologian	√	-	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal	Dinas Koperasi, UMKM, Perindag dan Bagian Ortala	
40	UPT Sentra Industri	Pembentukan Organisai, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Sentra Industri	√	-	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	Dinas Koperasi, UMKM, Perindag dan Bagian Ortala	
41	UPT Taman Hutan Raya (Tahura)	Pembentukan Organisai, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Taman Hutan Raya (Tahura)	√	-	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023	DLH dan Bagian Ortala	
42	UPT Persampahan	Pembentukan Organisai, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Persampahan	√	-	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023	DLH dan Bagian Ortala	

43	Kelas Jabatan	Penyusunan Kelas Jabatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja	√	-	Permen PAN dan RB No. 39 Tahun 2013	Bagian Ortala	
44	Pakaian Dinas	Penyusunan Aturan tentang Jenis Pakaian Dinas serta Atribut Pakaian Dinas Bagi ASN di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	√	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024	Bagian Ortala	
45	Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025	Mengatur Terkait Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025	-	√	Pemendagri 77 Tahun 2020	BPKPD	
46	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kabupaten Inklusi dan Perlindungan Penyandang Disabilitas	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kabupaten Inklusi dan Perlindungan Penyandang Disabilitas	√	-	Perda Kab. Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kabupaten Inklusi dan Perlindungan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial	
47	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tana Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025	Perubahan Standar Perjalanan Dinas Dalam daerah	-	√	Perpres 33 Tahun 2020	BPKPD	
48	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	Mal Pelayanan Publik	-	√	Permen PAN dan RB No. 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk teknis penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	DMPTSP	
49	Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru	Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru	√	-	Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG